

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah pertama dan kedua maka Penulis memberikan kesimpulan yaitu :

5.1.1 Implementasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas social dari pihak developer selaku pengembang kepada pemerintah daerah Kota Batam harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelaksanaan kewajiban developer untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dilakukan dengan berbagai proses di dalamnya mulai dari tahap awal pengajuan izin lokasi untuk membangun perumahan, hingga proses penyerahan fasilitas umum dan social tersebut. Setelah diserahkan developer tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut. Tanggung jawab sepenuhnya sudah beralih kepada Pemerintah Daerah dan penghuni Perumahan.

5.1.2 Kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas social dari pihak developer selaku pengembang kepada pemerintah daerah Kota Batam adalah faktor pengembang yang tidak bertanggung jawab serta dokumen peruntukan yang tidak sesuai. Terhambatnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena merugikan pemerintah daerah dan masyarakat di perumahan tersebut. Kerugian pemerintah yakni berkurang

atau hilangnya aset daerah sedangkan masyarakatnya tidak dapat merasakan fasilitasnya yang merupakan haknya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait rumusan masalah pertama dan kedua diatas maka Penulis memberikan saran yaitu

- 5.2.1 Diharapkan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dilaksanakan oleh developer sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Fasilitas. Sehingga developer selaku yang membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan perencanaan. Untuk terlaksana penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh developer secara efektif Pemerintah diharapkan lebih memperketat pengawasan terhadap developer-developer perumahan agar developer menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial ke Pemerintah Daerah dan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat dikelola dengan baik.

- 5.2.2 Diharapkan dengan terdapatnya factor-faktor atau kendala yang dialami selama proses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas social dari pihak developer selaku pengembang kepada pemerintah daerah Kota Batam hal ini Pemerintah dapat menerapkan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku kepada pihak pengembang perumahan yang memperlambat

penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan serta memberikan teguran secara tertulis mengenai developer yang tidak bisa mengikuti aturan yang berlaku.